

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
HARI SENIN, TANGGAL 26 MEI 2025
A C A R A
PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029**

- I. A C A R A** : Penyampaian Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029
- II. PIMPINAN** : Aris Syarifuddin (Ketua DPRD)
- III. SEKRETARIS** : 1. Sarji, S.IP., M.A.P. (Sekretaris DPRD)
2. Bambang Susilo, S.Si., M.Eng. (Plt. Kepala Bagian Perundang-Undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat)
- IV. TEMPAT/WAKTU** : Ruang Kresna DPRD Kulon Progo Pukul 10.30 – 12.30 WIB
- V. H A D I R** : 31 Anggota
- VI. TIDAK HADIR** : 1. Canggih Pulung Prabandaru, S.H.
2. Rizal Aldyatma
3. Dra. Keksi Wuryaningsih
4. B. Dwi Nugraha Santosa, S.E.
5. Jeni Widiyatmoko
6. Wisnu Prastya
7. Upiya Al Hasan
8. Budi Hutomo Putro, S.S.
9. H. Suradi, S.T., M.T.

VII.JALANNYA RAPAT

A. KETUA DPRD

Pembacaan Teks Pancasila

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo

Yang kami hormati Rekan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati

Yang kami hormati para Pejabat dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Dan semoga atas ridho-Nya, Rapat Paripurna DPRD ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati dan segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari jumlah 40 Anggota DPRD yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak : 31 Anggota, terdiri dari :

1. Fraksi PDI Perjuangan dari tiga belas anggota, yang telah hadir 9 anggota
2. Fraksi Partai Gerindra dari enam anggota, yang telah hadir 6 anggota
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari lima anggota, yang telah hadir 5 anggota
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari lima anggota, yang telah hadir 4 anggota
5. Fraksi Partai Golkar dari lima anggota, yang telah hadir 4 anggota
6. Fraksi Amanat Persatuan Perubahan dari enam anggota, yang telah hadir 3 anggota

Marilah Rapat Paripurna DPRD ini kita mulai dengan berdoa, menurut agama kita masing - masing, berdoa mulai selesai.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirokhiim” Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, hari ini Senin, tanggal 26 Mei 2025 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum
(Ketuk Palu 3X)

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Rapat Paripurna DPRD hari ini beracara pokok Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Marilah kita ikuti dan dengarkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Kulon Progo, disilahkan. (Ketuk Palu 1X)

B. BUPATI KULON PROGO (Dr. H. R. AGUNG SETYAWAN, S.T., M.Sc.)

Bupati Kulon Progo menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

C. KETUA DPRD

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati Kulon Progo yang telah menyampaikan pengantar Rancangan Peraturan Daerah.

Acara selanjutnya kami minta Saudara Kepala Bagian Hukum untuk membacakan Sistematika Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disilahkan (Ketuk Palu 1X)

D. BAGIAN HUKUM (HERI WARSITO, S.H, M.M.)

Kepala Bagian Hukum membacakan Sistematika Rancangan Peraturan Daerah.

E. KETUA DPRD

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Kepala Bagian Hukum yang telah menyampaikan Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,
Selanjutnya marilah kita ikuti dan dengarkan Penyampaian Pendapat Panitia Khusus sekaligus Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Kepada Saudara Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan (Ketuk Palu 1X)

F. JUBIR PANITIA KHUSUS (HUSEIN PAMBUDI)

Juru bicara panitia khusus menyampaikan pendapat panitia khusus terhadap Raperda tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

G. KETUA DPRD

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan Pendapat Panitia Khusus sekaligus Pandangan Fraksi-Fraksi.

Adapun Pandangan Fraksi-Fraksi secara lengkap dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Panitia Khusus tersebut.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut kami serahkan kepada Panitia Khusus untuk dibahas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Dengan telah selesainya Penyampaian Pendapat Panitia khusus sekaligus Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tersebut maka selesai sudah acara Rapat Paripurna DPRD ini.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati dan segenap hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat hingga selesai.

Tidak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama kami memimpin acara Rapat Paripurna DPRD ini.

Marilah Rapat Paripurna DPRD ini kita akhiri dengan berdoa bersama menurut agama kita masing-masing, berdo'a mulai,selesai.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo hari ini resmi kami tutup dengan mengucapkan "Alhamdulillahirobbil'alamiin" (Ketuk Palu 3X)

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

KETUA DPRD


ARIS SYARIFUDDIN

SEKRETARIS


SARJI, S.IP., M.A.P.

PARAF KOORDINASI	
	



BUPATI KULON PROGO

**PENGANTAR BUPATI KULON PROGO PADA
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029,
HARI SENIN TANGGAL 26 MEI 2025**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan
DPRD Kabupaten Kulon Progo;

Yang saya hormati, saudara Anggota DPRD
Kabupaten Kulon Progo,

Yang saya hormati sekretaris daerah, Asisten sekretaris daerah, Staf ahli bupati, kepala perangkat daerah,

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada acara Rapat Paripurna dalam keadaan yang sehat dan sejahtera.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas waktu yang diberikan, untuk menyampaikan pengantar sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Saudara Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang kami hormati,

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang sekaligus ini merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Bupati Kulon Progo dan Wakil Bupati Kulon Progo untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun ke depan.

Hadirin yang saya hormati, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk

periode lima tahun, yang menjadi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini telah dilakukan melalui proses yang partisipatif dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan, agar dapat merespon kebutuhan nyata di lapangan serta menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Adapun visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini adalah: **"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan"**

Visi ini kami turunkan ke dalam 4 misi strategis yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya, dan religius;
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*, aspiratif, serta masyarakat yang aman dan demokratis; dan
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Kami menyadari bahwa dalam lima tahun ke depan, tantangan pembangunan di kabupaten Kulon progo tidaklah ringan. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, serta seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini.

Melalui kesempatan ini, kami mohon dukungan dari DPRD, perangkat daerah, dan seluruh masyarakat untuk mengawal dan mendukung

pelaksanaan RPJMD ini dengan penuh komitmen, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah kita tercinta.

Demikianlah pengantar kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini, dengan harapan dapat segera diadakan pembahasan untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebelum kami tutup, perkenankan kami mohonkan waktu bagi Saudara Kepala Bagian Hukum untuk membacakan sistematika Raperda yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam rangka penyusunan Raperda dimaksud.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wates, 26 Mei 2025
/ BUPATI KULON PROGO,

/ Dr. H. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc., M.M.

PARAF KOORDINASI	
g	up

PENDAPAT PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025 – 2029

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.

Yang kami hormati, Saudara Pimpinan DPRD

Yang kami hormati, Saudara-saudara Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah serta Saudara Staf Ahli Bupati

Yang kami hormati, Para Pejabat dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Saudara Sekretaris DPRD beserta stafnya

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia.

Puji dan syukur Alhamdulillahirobbil alaamiin kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia dan nikmat Nya kepada kita, baik nikmat iman maupun kesehatan sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat bagi masyarakat Kulon Progo. Amiin.

Terima kasih kepada saudara Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya yang telah mengirimkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 dengan surat Nomor 000.7/1680 Hal : Pengiriman Dokumen Raperda tentang RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo, tanggal 19 Mei 2025.

Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Musyawarah yang telah menyusun jadwal untuk pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih juga kepada Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029, untuk menyampaikan Pendapat Pansus.

Terima kasih kepada seluruh anggota Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 yang telah bekerja dengan penuh semangat, serta tidak kenal lelah dalam mencermati dan membahas materi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 guna bahan penyusunan pendapat panitia khusus yang akan disampaikan pada rapat paripurna hari ini.

Perlu kami informasikan kepada Rapat Paripurna DPRD, bahwa Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025, adapun susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Dari Fraksi
1.	B. Dwi Nugraha Santosa, SE	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Husein Pambudi	Wakil	Fraksi Amanat Persatuan Perubahan
3.	Ida Ristanti, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Puspitasari Apriani, S.Keb	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Rian Nur Fajar	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
6.	Drs. HM. Maryono	Anggota	Fraksi PKS
7.	Agus Supriyanta	Anggota	Fraksi Partai Golkar
8.	Raden Bernadus Sri Sarendra Poetra, S.E.	Anggota	Fraksi Partai Golkar
9.	Upiya Al Hasan	Anggota	Fraksi PAN
10.	Kartono	Anggota	Fraksi PKB

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kulon Progo, Panitia Khusus telah mengadakan rapat internal dan telah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 beserta lampirannya, guna menyusun pendapat Panitia Khusus.

Adapun hasil pencermatan dan pembahasan panitia khusus yang kami sampaikan berupa pertanyaan dan permohonan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam hal pemerataan Pembangunan infrastruktur, apa yang menjadi prioritas daerah dan sejauh mana pembangunan di wilayah menoreh. Mohon penjelasan!
2. Untuk menunjang wisata, akses jalan menuju wisata perlu mendapat perhatian khusus. Contoh jalan menuju wisata mangrove dan jembatan merah di Pasir Mendit, Jangkaran, Temon. Seperti apa upaya Pemerintah Daerah untuk menanggapi hal tersebut. Mohon penjelasan!
3. Sejauh mana pembangunan kawasan industri bisa menarik investor untuk berinvestasi di Kulon Progo. Mohon penjelasan!
4. Bagaimana upaya peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses antar desa yang membantu akses sosial dan ekonomi wilayah. Mohon penjelasan!
5. Dalam pelayanan kemasyarakatan khususnya di bidang kesehatan, bagaimana upaya pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Mohon penjelasan!
6. Masih sering kita jumpai di tempat layanan Kesehatan tingkat I (puskesmas), jam operasional tidak sesuai dengan jadwal layanan yang tertera, mengapa demikian? Mohon penjelasan !
7. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting, khususnya menyangkut gizi dan akses kesehatan. Mohon penjelasan!
8. Beberapa Rumah Sakit di Kulon Progo, masih kekurangan jumlah tenaga medis khususnya Dokter. Seperti apa upaya Pemerintah Daerah untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut?

9. Beberapa jaminan Kesehatan, jaminan sosial mengalami penonaktifan secara sepihak oleh pemerintah. Mohon penjelasan!
10. Apresiasi dan kesejahteraan terhadap tenaga Kesehatan masih sangat minim. Seperti apa standar pemberian jasa medis selama ini, apakah memenuhi asas pemerataan dan keadilan. Mohon penjelasan!
11. Kualitas Pendidikan di Kulon Progo tidak merata, akibat adanya kesenjangan kualitas guru dan fasilitas Pendidikan. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi Guru baik negeri maupun swasta, termasuk kesejahteraannya. Mohon penjelasan!
12. Sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memberikan apresiasi terhadap pemuda berprestasi di bidang olah raga yang telah membawa nama kabupaten kulon Progo di kancah nasional maupun internasional ?
13. Adanya rencana Pemerintah pusat akan didirikan Koperasi Merah Putih, agar benar benar bisa mensejahterakan rakyat, langkah pemerintah daerah sudah sejauh mana. Mohon penjelasan !
14. Inovasi apakah yang akan dilakukan Pemerintah Daerah terhadap pemasaran hasil pertanian saat panen besar biar harga tetap bagus di petani. Misal panen cabai melimpah harga jatuh petani malah rugi , bawang merah dan lain lainnya. Mohon penjelasan !
15. Sektor pariwisata harus menjadi unggulan bagi Kabupaten Kulon Progo. Dimanakah Pemerintah Daerah sudah hadir dalam mendorong dan memfasilitasi baik pembangunan fisik maupun sumberdaya manusianya , mohon penjelasan !
16. Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, sejauh mana pelaksanaan Ripparda (2015 - 2025), mohon penjelasan !
17. Sejauh mana pemerintah mendorong UMKM dan usaha kecil bisa berdaya saing dengan produk produk pabrikan yang modern . Mohon penjelasan !
18. Bagaimana perlindungan pemerintah terhadap pasar tradisional dan penegakan Perda nya telah dijalankan , mohon penjelasan !

19. Kita sebagai bagian dari kota budaya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih sangat minim sekali perhatian pemerintah terhadap penggiat budaya yang banyak berada dimasyarakat, sejauh mana peran pemkap bisa meningkatkan kegiatan budaya dengan kemampuan anggaran dana keistimewaan . Mohon penjelasan !
20. Jumlah penduduk yang bisa dikatakan stagnan. Upaya pemerintah dalam peningkatan jumlah penduduk atau tinggal di kulon progo biar pembangunan dan PAD Kulon Pogo jadi meningkat, langkah yang diambil sudah seperti apa , mohon penjelasan !
21. Peluang kerja di Kulon progo sebenarnya cukup banyak tetapi kenyataannya pelamarnya sedikit, mohon penjelasan terkait dengan hal tersebut dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah !
22. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja yang berdaya saing di dunia kerja ?
23. Pelestarian lingkungan hidup, kebersihan lingkungan, sampah. Polusi udara . polusi air minum jadi tanggung jawab kita semua , sejauh mana Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan mengatasi sampah yang bisa menjadi bom waktu. Mohon penjelasan !
24. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan masih banyak kesemrawutan , penyalah gunaan keuangan yang tidak benar dan ketidak beresan . Sejauh mana Pemerintah Daerah memberikan pelatihan / bimbingan teknis untuk para perangkat kalurahan supaya bisa menjalankan pemerintah kalurahan dengan baik, mohon penjelasan !
25. Seperti apa upaya sikronisasi tata kelola pemerintahan kalurahan yang telah dilakukan, karena selama ini tata kelola pemerintahan kalurahan dinilai masih relatif rendah, mohon penjelasan !
26. Dengan berkembangnya teknologi berbasis on line , masih banyak kalurahan yang belum terlayani secara merata . Langkah apa yang ditempuh . Mohon penjelasan !

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Selain pendapat panitia khusus di atas, kami sampaikan juga pendapat fraksi fraksi. Adapun pendapat fraksi fraksi menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari pendapat panitia khusus ini. Selanjutnya kami berharap agar saudara Bupati dan jajarannya memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan dan permohonan penjelasan sebagaimana di atas.

Hal hal yang belum kami sampaikan pada kesempatan kali ini dan secara teknis perlu tambahan penjelasan dari Bupati dan jajarannya akan kami sampaikan pada forum rapat kerja.

Demikianlah Pendapat Panitia Khusus yang dapat kami sampaikan, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pengasih, 26 Mei 2025

PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN KULON PROGO

KETUA

WAKIL KETUA

B. DWI NUGRAHA SANTOSA, SE

HUSEIN PAMBUDI



**Fraksi PDI Perjuangan
DPRD Kabupaten Kulon Progo**

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN KULON PROGO**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025-2029**

**Disampaikan dalam
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KULON PROGO
Pada Senin, 26 Mei 2025**

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN KULON PROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat Siang,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu, Namo Budaya

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan saudara-saudara anggota DPRD,

Yang kami hormati Saudara Bupati Kulon Progo,

Saudara Staf Ahli Bupati,

Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah,

Saudara Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo,

Saudara Sekretaris DPRD beserta stafnya.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Mengawali Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kabupaten Kulon Progo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, marilah kita panjatkan Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas ridhoNya sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam ruang paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat, atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Terhadap Raperda Kabupaten

Kulon Progo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah di Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPJD Kulon Progo 2025-2045, agar berkesinambungan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Visi Pembangunan Kulon Progo 2025-2029 adalah Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religious, Berbudaya yang Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kulon Progo 2025-2029, yakni :

1. Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis serta visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Bupati Wakil Bupati adalah merupakan langkah untuk sasaran pembangunan jangka menengah yang didukung dengan arah kebijakan. Pembangunan Jangka Menengah daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Secara umum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat bahwa RPJMD harus memberikan gambaran secara tegas tentang arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo, dengan mempersandingkan analisa, faktor dan alasan yang holistik komprehensif. Gambaran yang dimaksud memuat tentang

penjelasan virtual berbasis data dan kajian yang memudahkan setiap *stakeholder* memahami dan mengerti kemudian bisa mengambil peran atau terlibat secara kolektif agar arah kebijakan benar-benar mencapai derajat manfaat yang optimal.

Selanjutnya berdasar pencermatan yang dilakukan terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pertanyaan dan mohon penjelasannya, sebagai berikut:

1. Apakah visi dan misi yang disusun dalam RPJMD sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini? Dan bagaimana pemerintah daerah melalui RPJMD ini dalam memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang mungkin terjadi selama periode 2025-2029?
2. Terhadap sasaran pembangunan selama 5 tahun, apakah ada sistem pemantauan dan evaluasi yang jelas untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan tersebut?
3. Dalam perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari kebutuhan anggaran untuk pembiayaan Pembangunan. Apa strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan, baik dari APBD, APBN, maupun pihak swasta? Dan apa saja alternatif sumber pembiayaan yang perlu dipertimbangkan agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik?
4. Dalam penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, apakah indikator pengentasan kemiskinan sudah mencerminkan realitas sosial di lapangan? Selanjutnya, apa langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial?
5. Dalam pembangunan infrastruktur fisik, bagaimana pemerintah daerah memastikan pemerataan akses infrastruktur wilayah terpencil, desa, dan kawasan perbatasan? Khususnya pada wilayah yang infrastrukturnya masih rendah ke akses pelayanan dasar.

6. Sejauh mana rencana Pembangunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia? Dan bagaimana arah kebijakan RPJMD ini terkait aspek pendidikan, aspek kesehatan dan pertumbuhan ekonomi?
7. Apakah pemerintah daerah dalam RPJMD ini memperhatikan perkembangan teknologi dan inovasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pembangunan?
8. Dalam peningkatan pelayanan publik, bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan tahapan dan pembiayaan transformasi digital layanan publik? Selanjutnya, apakah pemerintah daerah juga menyusun roadmap transformasi digital pelayanan publik?
9. Dalam hal investasi dan kerjasama, bagaimana sektor swasta dapat berperan dalam mewujudkan tujuan RPJMD ini, dan apakah ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mendorong investasi dan kemitraan antara pemerintah dan swasta?
10. Dalam bidang pariwisata dan budaya, apakah ada peta rencana pengembangan destinasi wisata yang berbasis potensi dan budaya lokal? Selanjutnya, apa kebijakan konkret pemerintah daerah untuk melestarikan situs budaya, upacara adat tradisi, dan seni budaya lokal?
11. Bagaimana pemerintah daerah melakukan mekanisme evaluasi terhadap pencapaian RPJMD setiap tahun? Apakah ada ruang untuk penyesuaian jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target?

Saran dan Rekomendasi

1. Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa visi "Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan mencerminkan aspirasi masyarakat. Namun kami menekankan pentingnya implementasi yang konkret dan terukur melalui program kerja yang realistis.

2. RPJMD ini sangat penting, menjadi catatan bahwa apa yang sudah dicantumkan dalam RPJMD perlu ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh Bupati dan OPD dengan serius demi kemajuan Kulon Progo.
3. RPJMD ini telah mengidentifikasi sejumlah isu strategis, namun kami mendorong agar infrastruktur jalan sebagai kebutuhan dasar masyarakat harus tetap di perhatikan, karena memiliki peran vital dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak aksesibilitas jalan yang baik bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Hal-hal yang belum kami sampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini, akan kami sampaikan dalam Rapat-rapat kerja selanjutnya, dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati.

Dan semoga ALLAH SWT, TUHAN Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya pada kita sekalian.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Merdeka...!

Pengasih, 26 Mei 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

KETUA



YULI YANTORO, S.E.

SEKRETARIS



DEWI NUGRAHENI, S.I.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 - 2029**

***Assalamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan.

Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.

Yang kami hormati Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya.

Yang kami hormati segenap Kepala Dinas, Kantor & Badan se - Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya.

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya.

hadirin dan undangan yang kami hormati.

Alhamdulillah, Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat iman, kesempatan, dan kesehatan serta ilmu kepada kita, sehingga diwaktu yang baik ini, kita bisa bertemu dan menghadiri kembali acara sidang paripurna kali ini. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pandangannya mengenai Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setiap Pemerintah Daerah dituntut menyiapkan rencana pembangunan daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu. Kebutuhan terhadap ketersediaan rencana pembangunan daerah yang adaptif, aspiratif dan mampu menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan di daerah, menjadi semakin penting dalam era sekarang ini. Rencana pembangunan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi, unggulan dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan rencana pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengatur keterkaitan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk menyiapkan berbagai rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai panduan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih dan sesuai kemampuan daerah atau organisasi pemerintahan daerah untuk mengimplementasikannya. Dalam waktu yang relatif pendek dokumen RPJMD diharapkan dapat disusun oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pandangan umum kali ini dan setelah mencermati, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seperti apakah visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD dikaitkan dengan visi dan misi kepala daerah? Mohon penjelasan.
2. Bagaimana relevansi visi RPJMD dengan kondisi dan tantangan daerah saat ini? Mohon penjelasan.
3. Seperti apakah integrasi hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dalam dokumen RPJMD? Mohon penjelasan.

4. Apakah kajian teknokratik dan analisis data dalam RPJMD telah mencerminkan kondisi faktual di lapangan? Mohon penjelasan.
5. Sejauh mana RPJMD Kulon Progo ini selaras dengan RPJPD 2025–2045. Mohon penjelasan.
6. Program prioritas apa saja yang ditetapkan dan bagaimana urgensinya terhadap kebutuhan masyarakat? Mohon penjelasan.
7. Sebelum penyusunan RPJMD, apakah telah dilakukan analisis kemampuan fiskal daerah? Mohon penjelasan.
8. Sejauh mana RPJMD mendorong inovasi daerah dan transformasi digital layanan publik? Mohon penjelasan.
9. Bagaimana strategi daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menghadapi perubahan iklim? Mohon penjelasan.
10. Apa program unggulan dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap bencana? Mohon penjelasan.
11. Bagaimana mitigasi risiko dirancang dalam RPJMD terkait dengan apa-apa saja yang dapat menghambat pencapaian target RPJMD? Mohon penjelasan.
12. Seperti apa evaluasi RPJMD nantinya? Mohon Penjelasan.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian pandangan umum FP Gerindra terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2025-2029. Kemudian pencermatan lebih lanjut akan kami lakukan pada rapat dan pembahasan berikutnya, apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, sekian.

***Assalamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Pengasih, 26 Mei 2025

**FRAKSI GERINDRA
DPRD KABUPATEN KULON PROGO**

Ketua,



(Sendy Yulistya Prihandiny, S.E.)

Sekretaris,



(Tito Kurniawan, S.H.)



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**



PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**



Disampaikandalam :

RAPAT PARIPURNA

DPRD KAB. KULON PROGO

Senin, 26 Mei 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kulon Progo.

Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kulon Progo

Yang kami hormati seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kulon Progo

Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kab. Kulon Progo

Yang kami hormati Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kulon Progo

Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Kab. Kulon Progo

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Alloh Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada kita sehingga Rapat Paripurna dalam kesempatan hari ini dapat terlaksana tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad Saw yang kita nantikan syafaatNya di dunia dan akhirat nanti, amin.

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Terimakasih kepada Panitia Khusus yang telah melaksanakan pembahasan serta pencermatan secara mendalam terhadap Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Setelah melaksanakan pembahasan di internal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, serta memperhatikan pendapat panitia khusus maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan pertanyaan, Klarifikasi dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kulon Progo pada tahun 2024 sebesar 15,62%, bagaimanakah perencanaan kedepan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo, mengapa angka kemiskinan di Kulon Progo selalu tertinggi di DIY, mohon penjelasan
2. Angka pengangguran di Kulon Progo juga masih tinggi, bagaimana inovasi pemerintah daerah mengatasi hal tersebut, harapan kami RPJMD ini menjadi tindaklanjut nyata upaya mensejahterakan masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Kulon Progo.
3. Beberapa investor sudah mulai membuka pabrik di Kulon Progo, seberapa besar prosentase keterlibatan warga lokal sebagai tenaga kerja di pabrik tersebut? Sejauh mana komitmen pemerintah Kulon Progo bersama investor terkait hal tersebut?. Bagaimana pemerintah Kulon Progo menyiapkan SDM-SDM unggul warga Kulon Progo agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah?.
4. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengangkatan pegawai-pegawai di dinas-dinas melalui PPPK, bagaimana dengan pegawai di dinas yang belum masuk di BKN, langkah apa yang akan di ambil pemerintah daerah?. Mohon penjelasan
5. Pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo menunjukkan tren meningkat, apa upaya pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo, sementara masih banyaknya infrastruktur yang merupakan jalur utama ekonomi mengalami kerusakan yang parah, mohon penjelasan?.
6. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu langkah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kelompok-kelompok

pemberdayaan seperti KWT, KT, KUBE dan lain-lain, mengapa penerima bantuan kelompok penerimanya itu-itu saja, mohon penjelasan dan bagaimana upaya pemerintah untuk menumbuhkan kelompok-kelompok pemberdayaan di masyarakat?.

7. Bantuan RTLH sebagai upaya memberikan stimulant bagi warga miskin untuk memiliki rumah layak huni, akan tetapi banyak penerima bantuan RTLH yang kemudian memiliki hutang karena bantuan dana RTLH tidak cukup untuk pembangunan rumah, bagaimana langkah pemerintah daerah terkait hal tersebut?.
8. Pariwisata merupakan salah satu pendukung PAD, mengapa wisata-wisata di Kulon Progo sejauh ini belum ada perbaikan dan peningkatan baik dari sarana prasarana dan managerialnya, dan mengapa di Kulon Progo belum ada tempat wisata unggulan seperti kabupaten-kabupaten di DIY lainnya.
9. Pantai selatan merupakan salah satu destinasi di Kulon Progo, tapi mengapa dari tahun ketahun belum ada perubahan yang berarti, sampah masih banyak berserakan, jalur wisata masih belum aksesibel seperti jembatan menuju pantai trisik yang sudah lama rusak dan belum diperbaiki.
10. Banyaknya kartu BPJS yang tiba-tiba non aktif padahal peserta BPJS tersebut benar-benar miskin sehingga terkedala dalam berobat, mohon penjelasan mengapa hal tersebut dapat terjadi?.
11. Penyertaan modal bagi BUMD-BUMD di Kulon Progo telah diberikan dengan jumlah yang tidak sedikit, upaya apa yang direncanakan Pemerintah Daerah untuk mendorong BUMD-BUMD tersebut mampu meningkatkan income bagi PAD (peningkatan yang signifikan).

12.Adanya bandara YIA menarik banyak investor untuk mendirikan hotel, penginapan dan rumah makan apakah ada langkah dari pemerintah daerah untuk mendorong BUMD untuk berinovasi dalam bidang-bidang yang memungkinkan menambah PAD Kulon Progo.

13. Gerakan mengoptimalkan lahan disekitar rumah untuk ditanam sayur mayur serta buah merupakan salah satu upaya ketahanan pangan bagi keluarga, mengapa gerakan tersebut hanya gertak sambal saja , mohon penjelasan?.

14.Pendidikan agama menjadi salah satu upaya pembentukan karakter bagi generasi muda ditengah-tengah banyaknya kenakalan remaja seperti narkoba, minuman keras, seks bebas, tawuran, klitih, bagaimana rencana pemerintah terkait hal tersebut,?.

Banyak pondok-pondok pesantren di Kulon Progo yang konsen akan problematika tersebut apakah pondok-pondok pesantren tersebut akan dilibatkan sebagai implementasi Perda Pondok Pesantren, mohon penjelasan?.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Adapun hal-hal yang belum kami sampaikan dalam pandangan ini akan kami sampaikan dan bahas dalam forum rapat kerja

mendatang. Apabila terdapat kekhilafan kami mohon maaf, sekian dan terimakasih.

WallohulMuwafiq Li Aqwamithoriq

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Kulon Progo, 26 Mei 2025

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

KETUA



QOIS REIZA FAHMI

SEKRETARIS



SUTRISNO

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN KULON PROGO
TERHADAP RAPERDA KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025-2029**

Assalamu'alaikum Wr Wb

Yang kami hormati, Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan DPRD,

Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati,

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo,

Yang kami hormati Sekretaris Dewan dan para Asisten Sekretaris Daerah,

Yang kami hormati Kepala-Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo,

Hadirin Rapat Paripurna dan para tamu undangan yang berbahagia,

Alhamdulillahirabbil 'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna hari ini.

Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029*.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati yang sebelumnya telah menyampaikan pengantar atas Raperda tersebut sehingga pada kesempatan ini, Fraksi PKS dapat memberikan Pandangan Umum.

Kepada Panitia Khusus, kami ucapkan terima kasih karena telah membahas hal tersebut secara efektif, juga telah menyusun pandangannya. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sependapat dengan hasil pembahasan pansus.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan Umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun-an yang akan dijadikan acuan oleh OPD dalam menyusun rencana strategis daerah (*renstra*) yang kemudian di *break down* menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga RPJMD merupakan syarat yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, setelah melalui serangkaian rapat dalam Fraksi, berikut ini kami *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029*.

1. Mohon penjelasan kebutuhan regulasi penunjang percepatan capaian visi misi dalam 3 (tiga) tahun kedepan serta daftar pembentukan perda yang dibutuhkan.
2. Apa terobosan pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan?
3. Dalam RPJMD disebut bahwa wilayah pesisir berpotensi untuk pengembangan sektor kelautan, perikanan, serta pariwisata bahari. Mohon penjelasan, kenapa Pemerintah Daerah lebih memilih fokus pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan mencakup wilayah Kapanewon Kokap, Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo?
4. Mohon disampaikan tempat/obyek wisata mana saja yang akan menjadi target ekowisata di kapanewon Kokap, Girimulyo, dan Kalibawang, serta tempat/obyek wisata agrowisata dengan konsep agropolitan di Kapanewon Kalibawang?
5. Arah pengembangan ketrampilan sumber daya manusia yang akan dilakukan Pemerintah Daerah diantaranya pada Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang meliputi kemampuan pemakaian *E-commerce* (Menjual produk melalui platform online dan memahami perilaku konsumen digital). Mohon penjelasan bagaimana mekanisme dan realisasinya serta daya dukung anggarannya?

6. Kapanewon Galur menjadi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan sektor unggulan pertanian padi, kedelai, dan kelapa, serta perikanan tangkap yang terpusat di TPI Trisik. Bagaimana Pemerintah Daerah mengatasi abrasi yang cepat di kawasan pantai Trisik, mengingat keberadaan TPI sudah sangat dekat dengan bibir pantai!
7. Apa saja strategi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan?
8. Mohon penjelasan bagaimana Pemerintah Daerah mensinkronkan RPJMD dengan program-program dari pusat!
9. Menindaklanjuti rencana pembangunan jalan tol yang melalui Kabupaten Kulon Progo, mohon penjelasan rencana Pemerintah Daerah menangkap peluang tersebut untuk kesejahteraan yang tertuang dalam RPJMD!
10. Upaya peningkatan jumlah sampah yang terolah perlu dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mohon penjelasan bagaimana realisasinya!
11. Bagaimana cara penguatan edukasi publik mengenai pemilahan sampah dan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga yang menjadi strategi kunci untuk memperkuat ketahanan sistem pengelolaan sampah jangka panjang?
12. Menurut RPJMD ini beberapa hal yang dapat menjadi penyebab ketidak mandirian pangan adalah ketidakmerataan distribusi pangan dan rendahnya pendapatan masyarakat. Upaya yang dapat diambil adalah meningkatkan infrastruktur distribusi dan pemberian bansos kepada keluarga berpendapatan rendah. Mohon penjelasan berapa

besar dan berapa lama dua upaya ini mampu menyelesaikan persoalan tersebut selama 5 tahun?

13. Berkaitan dengan pembangunan kawasan aerotropolis, bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi adanya kepadatan pemukiman serta kemungkinan timbulnya pemukiman kumuh di perkotaan?
14. Pengembangan kawasan perkotaan Wates sebagai pusat pendidikan, sehingga pengembangan kawasan diarahkan pada peningkatan infrastruktur pendidikan dan penguatan aksesibilitas transportasi dalam rangka mendukung kegiatan akademik dan mobilitas masyarakat secara optimal diperlukan. Mohon penjelasan seperti apa rencana pemerintah daerah?
15. Apa saja jenis infrastruktur jalan yang akan dibangun atau ditingkatkan dalam RPJMD?
16. Apa saja strategi pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi daerah?
17. Apa saja proyek investasi yang akan dilakukan dalam RPJMD?

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Raperda tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029*. Hal-hal lain dalam perkembangannya akan kami sampaikan pada rapat kerja. Apabila di dalam penyampaian ini terdapat kekhilafan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pengasih, 26 Mei 2025
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Sekretaris,

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agung', on a light yellow rectangular background.

Agung Raharjo, S.T.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jeni Widiyatmoko', on a light blue rectangular background.

Jeni Widiyatmoko



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULONPROGO**



*Jl. Sugiman, Pengasih, KulonProgo, Yogyakarta 55611 Telp. (0274)773271
Email : setwan@kulonprog.go.id, Website : dprd-kulonprogokab.go.id*

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 - 2029**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati :

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan DPRD ;

Saudara Bupati Kulon Progo dan Wakil Bupati Kulon Progo ;

Saudara-saudara anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo ;

Saudara Staf Ahli Bupati;

Saudara Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekretaris Daerah;

Saudara Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah kabupaten
Kulon Progo;

Saudara Sekretaris DPRD beserta stafnya;

Pertama dan utama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa mengikuti Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat, penuh kedamaian dan kebersamaan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Fraksi Partai GOLKAR untuk menyampaikan Pandangan Umum

terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 -2029.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Draf Raperda dimaksud pada Rapat Paripurna ini sehingga memudahkan bagi fraksi untuk mencermati Raperda tersebut.

Rapat paripurna Dewan dan Hadirin yang terhormat ;

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan memainkan peranan penting dalam upaya mensukseskan pembangunan diberbagai tingkatan baik nasional maupun daerah. Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam suatu pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan dengan berdasarkan berbagai prinsip seperti transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJMD merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan memainkan peranan penting dalam upaya mensukseskan pembangunan diberbagai tingkatan baik nasional maupun daerah. Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam suatu pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD adalah bagian dari janji yang telah disepakati dan disaksikan oleh masyarakat luas sehingga sudah semestinya Bupati dan Wakil Bupati harus menepati janji yang telah dibuat tersebut dalam bentuk realisasi program pembangunan yang dinanti-nanti oleh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Rapat paripurna Dewan dan Hadirin yang terhormat ;

Setelah melakukan pencermatan secara mendalam terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025 – 2029, F-PG memberikan beberapa catatan, pertanyaan serta masukan untuk lebih menyempurnakannya sebagai berikut :

1. Secara sistematis penyusunan RPJMD 2025 -2029, tetapi F-PG tidak menemukan perubahan yang signifikan dengan RPJMD sebelumnya, sebab menurut FPG belum ada turunan secara tahunan sehingga terkesan masih melakukan rutinitas birokrasi yang lalu dengan capaian program masih normatif dan tidak progresif. Misalnya, dalam penyusunan struktur perencanaan anggaran lebih mengadopsi Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Dalam hal ini kami mendorong kemauan politik Bupati harus kuat dalam mewujudkan program pembangunan sesuai dengan visi dan misinya.
2. Di dalam Pendapatan dan Belanja APBD 2025 -2029, terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara anggaran/belanja untuk aparatur dengan anggaran/belanja untuk program kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat. Belanja untuk aparatur masih relatif tinggi sementara belanja untuk peningkatan sarana prasarana, bantuan sosial, bagi hasil ke desa relatif tetap. Bagaimana strategi mengubah paradigma APBD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat?

3. Dasar penyusunan RPJMD seharusnya ditambahkan sandaran hukum yang lebih eksplisit terkait keadilan dan kesetaraan gender agar sinkron dengan pencapaian visi. Sehingga RPJMD juga merupakan cerminan dari rencana yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku Indonesia. Mohon penjelasan.
4. Data jumlah penduduk yang tersaji dalam RPJMD belum merupakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, wilayah, status ekonomi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan analisa gender. F-PG memandang, data terpilah sangat penting untuk menentukan arah kebijakan dalam semua sektor pembangunan yang responsif gender. Misalnya, angka pengangguran di Kulon Progo didominasi laki-laki atau perempuan, konsentrasi perempuan atau laki-laki bekerja di sektor mana saja? Strategi yang tepat untuk mengatasinya seperti apa? Contoh, peserta KB, apakah perempuan saja? Dimana keterlibatan laki-laki dalam ber-KB, sehingga bisa tergambar tanggungjawab bersama-sama bukan tanggung jawab perempuan saja. Sehingga dengan data yang terpilah secara jelas bisa tergambar representasi perempuan dalam kelembagaan-kelembagaan, seberapa peran perempuan dalam semua aspek kehidupan. Di dalam indikator Kinerja dan Capaian Misi “ Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan “, juga tidak menggambarkan seberapa representasi perempuan dalam SKPD. Mohon dijelaskan.
5. Dalam Bab Keuangan Daerah tidak hanya memuat komponen APBD saja seperti Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan melainkan juga gambaran tentang informasi atau penjelasan tentang kekayaan dan aset daerah. F-PG memandang, kekayaan dan aset daerah sangat penting untuk dijadikan modal dasar untuk melaksanakan program/kegiatan. Dukungan aset sangat penting untuk kesuksesan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Untuk itu, kami minta disajikan data yang komprehensif tentang aset dan kekayaan daerah.
6. Dalam hal meningkatkan kualitas hidup manusia, pendidikan menjadi salah satu pilar utama. Kabupaten Kulon Progo, sudah sepantasnya menjadi Kota Pendidikan yang bisa menjadi barometer di DIY. Sehingga kebijakan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo lebih di prioritaskan bidang pendidikan. Afirmasi kebijakan pendidikan tidak hanya kepada masyarakat miskin saja tetapi kepada seluruh warga dalam rangka memenuhi hak dasar manusia. Masih banyaknya persoalan-persoalan pendidikan yang belum terselesaikan seperti mahal biaya pendidikan, belum optimalnya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat,

disparitas kualitas sekolah, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. F-PG memandang dalam RPJMD tidak tergambar pendidikan sebagai program unggulan dalam pembangunan, padahal pendidikan merupakan isu strategis untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Mohon dijelaskan.

7. F-PG memandang terdapat data yang kontradiktif antara program kenaikan IPM dengan indikator derajat kesehatan masyarakat tinggi, harapan hidup masyarakat tinggi tetapi persentase keluarga miskin juga masih tinggi. Pemerintah daerah juga tidak terlihat keinginan yang kuat untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih melebihi angka kemiskinan secara nasional. Mohon dijelaskan.
8. Bagaimana strategi untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah yang tidak rentan dan membebani masyarakat? Mohon dijelaskan.
9. Dalam RPJMD 2025 -2029, F-PG melihat tidak ada gambaran target laju pertumbuhan ekonomi beserta strategi yang akan dicapai, sektor-sektor mana yang dominan memberi kontribusi. Tidak kalah pentingnya digambarkan juga selama 5 tahun bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim investasi di Kulon Progo yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran yang akhirnya bisa mengurangi kemiskinan. Mohon dijelaskan.
10. Hal yang tidak kalah penting bahwa program-program pembangunan yang telah tersusun ini harus segera diikuti strategi langkah yang riil atau nyata sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai, sehingga RPJMD ini tidak hanya bersifat teoritik dan normatif saja tetapi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Hal ini penting karena masyarakat tidak membutuhkan retorika-retorika yang akhirnya akan menjadi janji-janji belaka. sehingga sejauh mana RPJMD tersebut telah dilaksanakan. Mohon penjelasan.
11. Selanjutnya di dalam visi – misi saudara Bupati berkomitmen terkait sarana dan prasarana jalan untuk membuat jalan di Kabupaten Kulon Progo akan baik dan tidak berlubang-lubang. Bagaimana target yang telah dicapai. Mohon penjelasan.
12. F-PG mohon penjelasan terkait upaya mengantisipasi perubahan iklim akhir-akhir ini dengan langkah-langkah adaptasi strategi dan program yang terpolakan secara sistematis, baik pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya lingkungan untuk mengantisipasi bencana alam.

13. Mohon dijelaskan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
14. Mohon disampaikan Analisis Sinkronisasi antara RPJMD dengan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Bidang Peningkatan Daya Tarik Wisata.
15. Mohon penjelasan rencana strategis terkait perencanaan pembangunan di sektor ekonomi seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, tenaga kerja dan investasi.

Rapat paripurna Dewan dan Hadirin yang terhormat ;

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kulon Progo kami sampaikan, semoga bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak, dan semoga cita-cita Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan **visi “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan”**. Yang dijabarkan ke dalam empat misi utama yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang makmur, berbudaya, dan religius;
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), aspiratif, serta masyarakat yang aman dan demokratis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang lestari serta tangguh terhadap bencana.

Yang menjadi landasan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan betul-betul bisa direalisasikan. Dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian. Amin Ya Robbal Alamin.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pengasih, 26 Mei 2025

**Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
DPRD KABUPATEN KULON PROGO**

Ketua

Sekretaris



WIDIYANTO, S.Pd



Drs. SASMITA HADI



FRAKSI

**AMANAT PERSATUAN PERUBAHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PEMANDANGAN UMUM
AMANAT PERSATUAN PERUBAHAN
DPRD KULON PROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

*Disampaikan
Pada Rapat Paripurna
Hari Senin, 26 Mei 2025*

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI AMANAT PERSATUAN PERUBAHAN DPRD KULON PROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Assalamu'alaikum wr wb

Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semuanya

- Yang kami hormati Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo
- Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo
- Yang kami hormati saudara-saudara Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah
- Yang kami hormati Sekretaris Dewan beserta stafnya
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Alhamdulillah rabbil 'alamiin puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatNya, diantaranya pada saat ini kita mendapat ridhoNya dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Aamiin

Rapat Paripurna Dewan Yang terhormat,

Kami ucapkan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada FAPP untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Penjabat Bupati yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPJMN.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Setelah membaca, mencermati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, FAPP menindaklanjuti dengan Koordinasi Internal Fraksi serta melakukan Perumusan Pemandangan Umum Fraksi, FAPP berharap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 dilaksanakan Secara Transparan, Akuntabel, dan Melibatkan Masyarakat serta seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan, kami juga berharap proses ini berjalan secara demokratis dan partisipatif, aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan demikian ijinlah kami untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, saran dan masukan sebagai berikut :

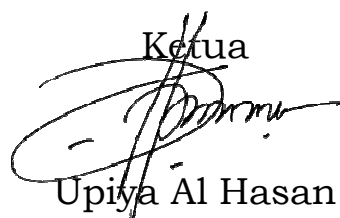
1. Mohon penjelasan tentang kelanjutan penataan pedagang Alun-alun wates serta kelanjutan penataan parkir sepanjang jalan lingkar alun-alun wates.
2. Mohon penjelasan tentang mekanisme rekrutmen tenaga penjaga loket tempat wisata dan status kepegawaiannya.
3. Mohon penjelasan Langkah strategis Pemerintah Daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat.
4. Potensi ekonomi bertumpu pada beberapa sektor yaitu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, pariwisata dan pertambangan serta potensi kawasan hutan. Potensi yang sangat besar tersebut memerlukan upaya-upaya sedemikian rupa, sehingga dapat menggerakkan roda

perekonomian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mohon penjelasan strategi Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim investasi yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran yang akhirnya bisa mengurangi angka kemiskinan.

Demikian Pemandangan umum Fraksi Amanat Persatuan Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029**, yang dapat kami sampaikan, adapun pertanyaan yang bersifat khusus baik yang menyangkut substansi materi maupun sistematika Raperda akan kami tanyakan dalam forum rapat kerja. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

FRAKSI AMANAT PERSATUAN PERUBAHAN
DPRD KABUPATEN KULON PROGO

Ketua

Upiyya Al Hasan

Sekretaris

Nasib Wardaya, S. Pd